

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berwisata merupakan salah satu kegiatan yang akan selalu dilakukan setiap masyarakat, baik dalam skala besar maupun skala kecil wisata akan menjadi hal wajib yang dilakukan masyarakat. Indonesia dengan berbagai potensi wisata yang ada menjadikan para wisatawan mendapatkan banyak pilihan dalam memilih tujuan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Destinasi wisata yang sangat beragam baik dengan konsep keluarga, adventure, pemandangan alam, sejarah, maupun pemandangan alam terbentang diseluruh daerah di Indonesia.

Objek wisata yang dikelola baik oleh pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat berlomba-lomba menyajikan tempat wisata yang menarik bagi wisatawan, namun tak juga lupa, dalam setiap pengembangan atraksi wisata perlu diperhatikan Standar Operasional Prosedur guna memastikan keselamatan para wisatawan yang sedang berwisata diobjek tersebut. Standar Operasional Prosedur yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu fasilitas keselamatan dalam suatu objek wisata, maupun regulasi mengenai standarisasi keselamatan yang ada baik dalam hal perlengkapan maupun kondisi kendaraan yang di pergunakan. Dan juga mengenai tentang petugas-petugas yang melaksanakan kegiatan Jeep Lava Tour Merapi seperti Pengemudi Jeep, petugas keselamatan penjaga rute yang di lalui oleh jeep lava tour merapi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia memiliki banyak pulau dan laut serta samudera yang mengelilingi di seluruh Nusantara. Indonesia dengan beragam tipografi keanekaragaman hayati dan hewani menjadikan negara Indonesia salah satu negara yang memiliki destinasi wisata yang luar biasa di

dunia. Keanekaragaman sumber daya alam serta aspek pendukung lainnya membuat destinasi wisata yang ada di Indonesia merupakan objek wisata yang alami dengan keindahan alam lah yang menjadi atraksi utama di setiap wisata yang ada di Indonesia.

Setiap objek Pariwisata memiliki daya tarik masing-masing dengan berbagai potensi yang ada dikembangkan menjadi suatu main attraction di suatu objek yang menjadikan hal tersebut menjadi suatu daya tarik utama bagi para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. *Main attraction* yang ada biasanya merupakan suatu hal yang bersifat alami maupun yang bersifat buatan manusia. *Main attraction* yang bersifat alami dapat dicontohkan seperti pemandangan alam, pemandian air panas, danau, gunung dll. Lalu untuk main attraction yang bersifat buatan seperti spot foto tambahan, wahana permainan, taman, dan tempat edukasi seperti museum ataupun laboratorium.

Berkembangnya pariwisata merupakan suatu potensi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dimana retribusi serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat seiring dengan perkembangan daerah wisata. Hal ini membuat daerah berbondong-bondong untuk menjangkau setiap potensi wisata yang ada. Seringkali pemerintah daerah merangkul pihak ke 3 maupun masyarakat sekitar dalam setiap pengembangan objek wisata yang ada. Pengembangan objek wisata dengan mengajak pihak-pihak lain membantu pemerintah dalam hal pembiayaan dan pengembangan main attraction yang ada, sehingga pariwisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan para wisatawan. Pengembangan fasilitas pendukung objek wisata pun lebih ringan dengan adanya bantuan pendanaan dari pihak ke 3 serta adanya kegiatan gotong royong oleh masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan banyaknya potensi wisata dengan gencar melakukan pengembangan objek wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan label DIY yang merupakan daerah yang terkenal dalam hal budaya dan pariwisatanya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak main-main dalam hal pembangunan daerah wisata yang ada. Pembangunan itu jelas tersusun di PERDA DIY NO 1 tahun 2012 tentang RIPPARDA

(Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata) DIY yang menjadi induk rujukan pembangunan wisata yang ada di DIY dengan konsep kebudayaan. Rancangan itu menjadi acuan untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Perda tersebut telah secara eksplisit memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder kepariwisataan DIY, tuntutan sinergitas antar sektor, serta pembagian peran para actor/pelaku pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan. Dengan diluncurkannya slogan baru Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Jogja Istimewa, maka diharapkan dapat semakin menambah semangat seluruh stakeholder kepariwisataan DIY untuk mewujudkan kepariwisataan DIY yang benar-benar istimewa. Keistimewaan tersebut diharapkan dapat tercermin mulai dari tata kelola pemerintahannya yang baik, manajemen pengelolaan Daya Tarik Wisata yang baik, maupun industri kepariwisataan yang juga berkualitas. Dengan demikian diharapkan akan semakin memperkuat ciri keistimewaan kepariwisataan DIY dibandingkan dengan destinasi lain di Indonesia, guna mendukung pencapaian visi yaitu pada tahun 2025 Yogyakarta akan menjadi Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara. Sinergi antar sektor serta pembagian peran untuk setiap stakeholder guna bekerja sama dalam pembangunan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan.

Merapi Lava Tour menjadi salah satu tujuan wisata baru yang menjadi tujuan utama para wisatawan untuk datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Bencana meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 menjadi salah satu bencana besar yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya namun di sisi lain bencana tersebut menghasilkan hal positif bukan hanya dalam hal keseimbangan alam namun dalam hal munculnya destinasi wisata baru yang di kembangkan. Melihat unsur historis merapi dengan segala legenda digdayanya mendorong masyarakat untuk mengembangkan wisata keliling merapi. Daerah sekitar merapi yang dinilai masyarakat sekitar memiliki unsur historis yang sangat tinggi membuat para wisatawan tertarik untuk datang dan melihat dampak letusan gunung merapi tahun 2010. Salah

satu objek andalan dalam wisata mengelilingi Merapi merupakan Merapi Lava Tour. Wisata yang mulai ramai pada tahun 2012 ini menjadi salah satu objek yang dalam pembangunannya di fokuskan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah dari sektor swasta pun melihat peluang yang besar dalam pengelolaan wisata Lava tour Merapi. Kelompok pemilik jeep dan penyelenggara lava tour saling bersaing dalam penyediaan paket wisata lava tour Merapi. Dengan berkembangnya kelompok-kelompok serta peguyuban penyelenggara Lava Tour membuat pengawasan dalam penyelenggaraan lava tour semakin mudah.

Lava Tour Merapi dalam setiap paket wisatanya menyediakan kendaraan Jeep yang sudah termasuk Supir dan juga tiket masuk untuk setiap objek yang di datangnya. Lava tour Merapi memiliki beberapa pilihan paket wisata diantaranya Rute Pendek, sedang dan panjang dengan pilihan tambahan track air di setiap paket yang di sediakannya. Semua rute yang di persiapkan sudah di nilai layak untuk di lewati kendaraan jeep yang sudah di desain kusus untuk melewati medan offroad. Setiap mobil jeep yang di naiki maksimal peserta yang dapat di tampung oleh satu mobil jeep adalah 4 orang dewasa di tambah 1 supir mobil jeep. Dengan biaya yang telah di tentukan semua fasilitas tersebut bisa di dapatkan di paket wisata lava tour Merapi, namun yang menjadi sorotan adalah unsur keamanan yang ada dalam kendaraan yang di pergunakan untuk lava tour Merapi. Rata-rata kendaraan yang di pergunakan merupakan kendaraan modifikasi yang di lakukan oleh masing-masing pemilik tanpa pengawasan serta sertifikasi dari pihak yang berwenang dalam hal keamanan. Modifikasi kendaraan yang di lakukan biasanya dalam hal potong body kendaraan serta penambahan aksesoris lainnya. Hal ini di lakukan oleh para pemilik kendaraan jeep karena mayoritas wisatawan memilih kendaraan yang menarik, baik dari segi aksesoris maupun dari segi bentuk kendaraan yang ada. Maka dari itu para pemilik kendaraan berlomba-lomba untuk membuat mobil yang di miliki menjadi semenarik mungkin. Namun seringkali modifikasi yang di lakukan tidak sesuai standar keamanan kendaraan.

Mayoritas kendaraan yang di modifikasi untuk menjadi mobil jeep merupakan mobil tua yang kemudian di modifikasi bahkan di ganti mesin agar memiliki tenaga mesin yang lebih guna melewati rute yang di lewati oleh kendaraan tersebut, selain itu para wisatawan mendapatkan alat keselamatan standar berupa helm serta pelampung yang berfungsi untuk pelindung tubuh namun apakah hal tersebut sudah cukup untuk menjamin keselamatan para penumpang. Karna di samping adanya alat bantu guna keselamatan para wisatawan. Dari segi penyelenggara juga berperan untuk keselamatan para wisatawan yang ada. Di samping perawatan berkala kendaraan yang di pergunakan serta kemampuan mengemudi para supir jeep lava tour harus di perhatikan secara serius karna akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keselamatan para wisatawan.

Praktis di tahun 2018 kecelakaan yang terjadi pada Jeep lava tour merapi terjadi sebanyak 3 kali dimana menewaskan 2 korban jiwa dan 10 lainnya terluka. Kecelakaan yang terjadi mayoritas berkaitan dengan kondisi mobil yang tidak laik jalan, medan yang cukup curam serta kemampuan pengemudi yang kurang memadai yang mengakibatkan pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Tingginya antusias masyarakat menjadikan banyak sekali penyedia jeep lava tour yang menyediakan kendaraan tidak sesuai dengan standar kendaraan jeep, serta skill mengemudi yang kurang mumpuni seringkali di paksakan mengingat tingginya okupansi wisatawan jeep merapi.

Jeep lava tour merapi di gemari oleh masyarakat karna banyaknya atraksi yang di suguhkan, di samping merupakan objek wisata yang syarat akan sejarah letusan merapi yang dahsyat, jeep merapi juga menyuguhkan banyak sekali keindahan alam dari gunung merapi yang sangat luar biasa. Ramainya pengunjung tentu harus di imbangi oleh pengurus dengan kepengurusan yang baik dan pengawasan yang ketat. Jeep merapi lava tour dengan tingkat resiko yang tinggi dalam penyuguhannya dapat menarik wisatawan yang sangat banyak dan menjadi salah satu destinasi unggulan yang saat ini berada di

daerah merapi serta menyerap banyak sekali tenaga kerja dari warga sekitar lereng gunung merapi

Pengembangan wisata harus di imbangi dengan adanya sinergitas antar stakeholder agar tercipta wisata yang aman dan menarik untuk para wisatawan. Promosi yang gencar tidak cukup apa bila masih mengesampingkan faktor keamanan di setiap attraction yang ada. Berdasarkan permasalahan yang sudah di jelaskan di atas, lalu sebagai mana objek wisata lava tour ini dalam memperhatikan faktor keselamatan para wisatawan, bagaimana pemerintah dan pihak penyelenggara bersinergi untuk menangani keselamatan wisatawan Jeep Lava Tour Merapi, penulis akan membahas hal tersebut dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka dapat di tarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Peran Para Stackholders dalam tata kelola keselamatan atraksi wisata Volcano Tour Merapi di Kelurahan Umbulharjo, Cangkringan dalam Mewujudkan Keselamatan Wisatawan Jeep Lava Tour Merapi tahun 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di susun guna mengetahui Peran Pemerintah Desa Umbulharjo Cangkringan dan Para Stackholders dalam Mewujudkan Keselamatan Wisatawan Jeep Lava Tour Merapi pada Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang bermanfaat sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan terutama bagi para akademis yang ingin mencari bahan rujukan tentang Peran

Pemerintah Daerah Umbulharjo Cangkringan dalam Mewujudkan Keselamatan Wisatawan Jeep Lava Tour Merapi pada Tahun 2019.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam teknis penerapan Colaborative Government dalam pengelola wisata khususnya di Kabupaten Sleman agar terwujudnya Colaborative Government yang ideal dalam pengelolaan objek wisata.

E. Literatur Review

Literatur Review adalah kumpulan penelitian dan hasilnya dilampirkan untuk alasan publikasi dan juga sebagai referensi di bidang akademik. Pada table di bawah ini, penulis melampirkan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Penelitian sebelumnya ini juga menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

No	Judul Peneliti Terdahulu dan Tahun Penerbitan	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Tata Kelola Pariwisata Bencana Dalam Perspektif Collaborative Goernance Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman (Zaenuri M. , 2016)	Pemerintah Pusat perlu untuk meninjau kembali tentang sinkronisasi antara Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dengan Undang undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam undang penanggulangan bencana hanya dikenal tiga fase manajemen bencana yaitu fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, sedangkan di sebagian besar konsep tentang pariwisata-bencana fase saat terjadinya bencana merupakan tahap tersendiri dan masih memberikan peluang untuk aktifitas pariwisata. Diantara kedua regulasi tersebut tidak mengatur tentang fase saat terjadinya bencana yang berkaitan dengan pariwisata.
2.	The Management of Danau Sipin as a Waterfornt City Tourism With Collaborative	Berdasarkan tujuan penelitian di latar belakang, yaitu untuk menjawab keterlibatan aktor dan proses kolaboratif mengelola Danau Sipin sebagai wisata Waterfront City daya tarik. Kesimpulan pertama dapat ditarik, partisipasi aktor dalam pengelolaan obyek wisata

	<p>Governance Approach (Yusuf, Samsuddin, & Yuskha, 2019)</p>	<p>melibatkan aktor primer dan sekunder yang memiliki tujuan yang sama untuk mempertahankan keberlanjutan Danau Sipin sebagai objek wisata sebagai sumber ekonomi. Pengelolaan objek wisata tidak selalu membutuhkan kunci / utama aktor dalam mengoordinasikan mitra. Namun, tidak adanya aktor kunci / utama dari keduanya pemerintah dan non-pemerintah menciptakan potensi vertikal dan horizontal konflik. Kedua, kolaborasi dapat terjadi antara berbagai aktor yang harus berpartisipasi dalam inisiatif untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung tanpa melalui khusus dialog tatap muka. Membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan, dan berkomitmen untuk proses adalah penting karena dari proses ini dalam konteks manajemen Danau Sipin dapat dilakukan. Berdasarkan fenomena ketidakharmonisan antar lembaga pemerintah, maka solusi alternatif untuk masalah yang bisa dilakukan adalah persiapan master merencanakan pengembangan dan pengelolaan Danau Sipin sebagai daya tarik wisata Waterfront City. Itu potensi konflik antar lembaga pemerintah memerlukan formulasi yang jelas otoritas, tidak hanya lintas lembaga pemerintah tetapi juga perumusan yang ketat otoritas dan urgensi dari keterlibatan aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah. Kompleksitas hubungan kelembagaan yang bersifat horizontal dalam konteks manajemen Danau Sipin tidak dijawab dalam penelitian ini, oleh karena itu penelitian lebih lanjut spesifik dibutuhkan.</p>
3.	<p>Tourism Governance and Community Collaborative and Rural development:</p>	<p>Fase penataan atau implementasi kolaborasi pariwisata membutuhkan pembangunan struktur yang sesuai untuk melembagakan pariwisata dan proses pembangunan pedesaan yang mendukung maksimalisasi kontribusi ekonomi kepada masyarakat pedesaan setempat. Perlu</p>

	Case Studies From Finland and China (Keyim, 2016)	membangun kemitraan yang lebih luas dan setara antara pemerintah dan non-pemerintah pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan dan implementasi kekuatan, untuk mengadvokasi keterwakilan pemangku kepentingan dengan latar belakang yang berbeda. Namun, melibatkan pemangku kepentingan lebih luas dari semua sektor selama semua fase pendekatan kolaborasi pariwisata, khususnya keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat, dimodulasi oleh pengaturan pedesaan sosial-ekonomi dan kelembagaan yang berbeda di dalam negara maju dan negara berkembang. Kolaborasi pariwisata yang inklusif ini pendekatan membutuhkan sumber daya yang memadai untuk memastikan kolaborasi melalui pemberian mandat eksternal dan / atau internal, termasuk investasi awal pemerintah dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan dorongan pengembangan 'bottom-up'.
4.	Model Collaborative Governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism (Rozikin, Wismanu, & Muttaqin, 2019)	Peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism, bukan hanya pada peran pemerintah pusat ataupun daerah, tetapi melainkan peran keseluruhan aktor yang berada didalam masyarakat pariwisata yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mampu diwujudkan apabila kerjasama keseluruhan aktor masyarakat pariwisata dapat terlaksana dengan baik, atau dengan istilah lain terwujudnya Collaborative Governance di sektor pariwisata. Collaborative atau kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor maupun individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam beberapa kegiatan.

5.	<p>Tourism Destination Management : A Collaborative Approach (Ammirato, Felicetti, & Gala, 2014)</p>	<p>Pentingnya manajemen rantai pasokan yang terdistribusi dan efisien untuk tujuan pariwisata terkait baik dengan kemungkinan untuk memberikan pembangunan berkelanjutan untuk tujuan, dalam upaya untuk mengatasi batas ukuran dan jangkauan organisasi pariwisata skala ekonomi dan daya saing berbeda dengan pemain besar; dan untuk keharusan menjawab permintaan penawaran wisata hasil personalisasi, sejalan dengan tren permintaan baru. Banyak kasus yang diteliti menegaskan bahwa perencanaan umum dari jaringan organisasi model dan solusi pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan operasionalisasi konsep kolaborasi di sektor pariwisata dan pengaturan Collaborative Network di Tourism Breeding Environment. Di dalam makalah kami lebih lanjut memotivasi adopsi model Collaborative Network untuk tujuan wisata menyoroti bagaimana globalisasi dan evolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi jauh lebih efisien dan tepat waktu cara keduanya menjadi turis (memperkenalkan siklus hidup turis 2.0 dan yang ditambah konsep pengalaman wisata) dan untuk mengelola, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi berjejaring.</p>
6.	<p>Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar (Yasintha, 2020)</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menguraikan collaborative yang dijalankan dalam pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar melalui dua konsep yakni proses kolaborasi oleh Willem dan Gash. Untuk konsep kolaborasi adapun hasil dari observasi diuraikan berdasarkan indikator sebagai berikut. Face to Face (dialog tatap muka) Penyelenggara pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar dibawah pengawasan pemerintah dan Dinas Pariwisata, Pengusaha Hotel dan Restoran, serta Tokoh Masyarakat. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk</p>

		<p>membahas persiapan dan segala instrument yang diperlukan dalam pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar. Akan tetapi dalam dialog tersebut belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder. Dari segi Trust Building atau Membangun Kepercayaan Kepercayaan antar stakeholder dari awal sudah terbangun dengan baik. Hal ini dikarenakan visi dan tujuan yang dibawa dalam hal ini sama yakni meningkatkan dan mengembangkan pariwisata budaya yang ada di Gianyar dan upayanya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.</p> <p>Dari segi Commitment to Process Hal ini didasarkan pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Dalam kerjasama tersebut diikat dalam suatu kontrak kerjasama dengan pihak stakeholder baik masyarakat atau swasta. Kontrak kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk ikatan komitmen antara berbagai pihak. Hanya saja dari pihak pengusaha sekitar belum jelas Bentuk kontribusi yang diberikan, selain itu awig-awig desa juga belum secara jelas menjelaskan mengenai keterlibat mereka. Hal ini berdampak kepada masih minimnya keterlibatan yang diberikan oleh pihak swasta dan masyarakat. Dari segi share understanding menunjukkan dengan keterbukaan informasi kepada stakeholder. akan tetapi setiap stakeholder tidak diberikan informasi yang sama, hal ini tergantung dari permintaan dari stakeholder itu sendiri. Masih terdapat beberapa informasi yang belum di berikan secara jelas kepada publik. Misalnya masalah keuangan yang diterima. Dari segi pencapaian sementara, melalui collaborative governance pengembangan wisata Kebun Raya</p>
--	--	--

		<p>Tematik Gianyar telah berhasil mengundang wisatawan. Hanya saja karena sosialisasi dan promosi yang kurang masih banyak wisatawan lokal yang mendominasi kunjungan ke Kawasan ini. Sebaliknya dalam membangun relasi antara stakeholder collaborative yang dilaksanakan belum optimal, sejauh ini feedback dari kerjasama yang dilaksanakan belum dirasa optimal.</p>
7.	<p>Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (Risanti & Winarni, 2018)</p>	<p>Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Pengelola desa wisata, masyarakat dan Swasta (LSM, Bank serta Perguruan Tinggi) belum optimal. Hal ini berdasarkan analisis terhadap delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi menurut DeSeve (2007) yang tidak tercapai yaitu belum ada aturan resmi yang mengikat kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan kurangnya kepercayaan antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Faktor penghambat berasal dari faktor budaya terkait kesadaran masyarakat yang menganggap wisata adalah hal yang negatif, faktor institusi terkait ketergantungan desa wisata terhadap Dinas Pariwisata maupun swasta sehingga terkesan mendominasi. Kemudian faktor politik, tidak adanya regenerasi pengelola dan pokdarwis desa wisata mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia.</p>
8.	<p>Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa</p>	<p>Efektivitas kolaborasi dalam program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur atau Balkondes Warung Kopi Borobudur adalah dari semua indikator keberhasilan kolaborasi</p>

	<p>Wisata (Mafaza & Setyowati, 2020)</p>	<p>menurut DeSave yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Networked structure, (2) Commitment to a common purpose, (3) Trust among the participants, (4) Governance, (5) Access to authority, (6) Distributive accountability /responsibility, (7) Information sharing, dan (8) Access to resources, sudah berjalan dengan baik. <p>Hanya saja terkait entitas administratif dalam perjanjian kerjasama hanya mengatur antara PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (PT. TWC) selaku BUMN pendamping dan sponsor, dan Pemerintah Desa Borobudur melalui BUMDes, belum menjelaskan terkait keterlibatan PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) yang sekarang selaku pengelola Program Balkondes. Sehingga boundary dan exclusivity dalam governance belum menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.</p>
9.	<p>Collaborative Government dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang</p>	<p>Faktor penghambat dalam collaborative governance terkait upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang adalah access to resources yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki masing-masing instansi yang masih belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan</p>

	(Tilano & Suwitri, 2017)	kegiatan masing-masing instansi, selain itu Sumber Keuangan juga menjadi kendala yang serius karena keterbatasan dana yang dimiliki setiap instansi mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara maksimal, karena setiap dana yang diberikan kepada masing-masing instansi harus dibagi lagi untuk membiayai beberapa kegiatan selain kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
10.	The Model Of Collaborative Governance in Tourism Development at Button District (Islmy, Haning, & Allorante, 2017)	Pemerintahan Kolaboratif di Kabupaten Buton dalam pengembangan budaya, pariwisata dan sejarah ditentukan oleh para aktornya. Pelaku yang dimaksud disini adalah Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat, Pemerintah Desa / Desa), lembaga adat dan swasta. Para aktor sangat menentukan Collaborative Governance ini bisa berjalan atau tidak. Peran para aktor juga sebagai jaminan untuk kolaborasi yang sedang berlangsung mendapat dukungan penuh atau tidak. Peran aktorlah yang menentukan berhasil tidaknya membangun kolaborasi dalam pengembangan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Buton. Collaborative Governance dalam pengembangan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Buton belum berjalan secara maksimal karena keseimbangan peran dalam kolaborasi belum terlalu terlihat, minimnya peran swasta dalam kolaborasi terkesan hanya sebagai pelengkap dari pihak swasta. hanya menjabat sebagai pelaksana kegiatan. Hubungan antar aktor dalam Collaborative Governance belum terjalin dengan baik. sering terjadi kolaborasi antara para peserta ketidaksepakatan besar terutama para pemimpin adat sering terjebak pada masalah larangan yang mengandung unsur pamali. Collaborative Governance yang diwujudkan dalam

		<p>pengembangan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Buton yaitu model yang menunjukkan ciri kekuatan kepemimpinan model fasilitatif (Facilitative Leadership) yang dimainkan dengan gemilang oleh Parabela dalam memediasi proses kolaborasi dan ujung tombak pelestarian. masyarakat adat dan budaya Buton. Selain itu kolaborasi ini berjalan dengan aturan masyarakat adat.</p>
11.	<p>Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour (Diani & Simbolon, 2017)</p>	<p>Dalam menjalankan pariwisata bencana Lava Tour di Merapi tersebut, pemerintah tidak sendirian. Melainkan ada pihak swasta dan juga masyarakat yang ikut andil dan berperan terwujudnya program yang telah dirancang oleh pemerintah. Wujud dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata bencana Lava Tour tersebut dapat dilihat dari pembagian kerja masing-masing pihak. Pihak pertama yang berperan tentu saja pemerintah. Peran dari pemerintah sendiri tidak jauh dari kebijakan, bagaimana agar pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Secara garis besar kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah demi menunjang pengelolaan pariwisata bencana tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar.</p>
12.	<p>Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu</p>	<p>Tahap Pertama Face to face dalam proses collaborative governance melibatkan pemerintah, masyarakat sekitar objek wisata dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah untuk membahas perencanaan pengembangan wisata edukasi. Tahap Berikutnya adalah Trust building atau membangun kepercayaan yang dilakukan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan juga dalam kebersihan</p>

	Utara (Alamsyah, Mustari, Hardi, & Mone, 2020)	menyediakan beberapa tempat sampah di lokasi wisata. Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi telah melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban. Kemudian melibatkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan, memantau, membina dan melakukan promosi. Shared understanding untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan yaitu terdapat forum sosialisasi maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, menyediakan pamong wisata untuk mengontrol keamanan wisata.
13.	Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara (Ali, Amlu, & Zulhadi, 2018)	Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 64.374 dan pada tahun 2014 503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti Badan Promosi Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa serta

		<p>melakukan pengalangan dana selain dari APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.</p>
14.	<p>Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu (Kirana & Artisa, 2020)</p>	<p>Pendekatan Collaborative Governance digunakan oleh pemerintah Kota batu dalam mengembangkan desa wisata. Hal ini dapat terlihat dari adanya pola kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Batu dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media. Masing-masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Terdapat pola-pola komunikasi yang intens dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada para pelaku bisnis berkaitan dengan program-program pengembangan agrowisata yang akan dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga diberdayakan melalui kelompokkelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata. Konsep Collaborative Governance yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor agar desa wisata dapat berkembang secara optimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata.</p>

15.	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Syahputra & Ma'ruf, 2020)	Pada penelitian terdapat perbedaan pendapat mengenai collaborative dilakukan dengan pihak mana saja, Pemerintah Kabupaten Blitar selaku inisiator mengusulkan kolaborasi dalam bentuk dua pihak antara Pemerintah Kabupaten dengan Perhutani. Pihak Perum perhutani mempunyai pendapat sendiri dengan mengusulkan pemerintah desa dilibatkan dalam perjanjian kerjasama dengan bentuk kolaborasi tiga pihak. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan Pemerintah desa merupakan bagian kewilayahan dari pemerintah daerah yang berimplikasi pada kewenangan desa untuk menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya. UU no 6 tahun 2014 pasal 9 mengenai kewenangan lokal bersekala desa yang dimiliki desa dalam bidang pembangunan desa untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri diluar destiniasi yang sudah masuk rencana pembangunan pemerintah kabupaten. Membuktikan penyelesaian persoalan mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan telah menyepakati bentuk kerjasama dengan tiga pihak memberikan kepercayaan diri terhadap pemerintah desa untuk melakukan pengembangan terhadap destinasi wisata tanpa menunggu perintah dari pemerinah kabupaten
-----	--	--

Keseluruhan penelitian diatas berfokus pada bagaimana suatu pengelolaan pariwisata yang baik akan menjadikan suatu destinasi pariwisata berkembang dengan baik juga, penelitian terdahulu lebih mengarah ke sistem pengelolaannya secara manajemen baik dari pemberdayaan masyarakat dan promosi pariwisata, dalam penelitian yang akan dilakukan, pembahasan lebih mengarah tentang bagaimana peran para stackholder terkait dalam hal keselamatan wisatawan, apa saja yang harus di terapkan dan bagaimana pengelolaan keselamatan wisatawan dapat mewujudkan suatu destinasi wisata yang aman bagi para wisatawan.

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam hal bagaimana pengolahan data yang di lakukan dalam penelitian yang melibatkan Collaborative Government dalam pengelolaan pariwisata, serta menjadi acuan dalam proses pengambilan data serta proses pengolahan data menjadikan suatu rujukan dari penelitian terdahulu, di dalam penelitian terdahulu juga menjadi suatu rujukan dalam menentukan teori yang di gunakan dan juga pengerjaan penelitian yang di lakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang ada.

F. Kerangka Teori

1. Governance

Governance adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. (Keban, 2008, p. 38), menurut (Dwipayana & Eko, 2003) Governance berbeda dengan government (pemerintah), dalam arti yang lebih sederhana governance merupakan sebagai lembaga, tetapi governance dalam arti yang kompleks dijabarkan menjadi sebuah proses pemerintahan. Government lebih diartikan menjadi “mereka” sedangkan governance diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini konteks government dilihat seolah-oleh hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari konteks governance atau “kita” memberikan penjelasan bawasanya terdapat peleburan antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena governance ini melibatkan semuanya dalam berbagai proses governance.

Konsep governance itu sendiri menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagai salah satu aktor yang ikut dalam proses governance dan tidak harus menjadi aktor yang paling menentukan, dalam implikasinya peran dari pemerintah penyedia pelayan publik atau pembangun infrastruktur yang bisa jadi akan bergeser menjadi pendorong sebagai pihak yang memfasilitasi pihak lain atau sektor swasta yang memiliki peran aktif dalam mewujudkan upaya kebijakan atau program tersebut (Sumarto, 2004).

Menurut Kapucu, Naim; Farhod Yuldashev, and Erlan Bakiev , (2009:45) Governance adalah sebuah proses pembuatan keputusan dengan melibatkan aktor state dan nonstate. Governance memandu proses yang mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam sektor privat, publik dan sipil. Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Sedarmayanti,2003:5) berpendapat Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Karena itu instansi dari governance meliputi 3 intitusi yaitu sebagai berikut: state (pemerintah), society (masyarakat), dan private sector (sektor swasta atau dunia usaha).

Menurut Dwiyanto (Dwiyanto, 2005) menjelaskan bahwa governance adalah pelaksana fungsi governing yang secara bersama-sama pihak pemerintah dengan pihak

intansi-instansi lainnya seperti LSM, perusahaan dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan program maupun kebijakan publik hal ini menunjukan bawasannya kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah atau menjadi urusan dari pemerintah. Meskipun perspektif governance mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Sedangkan menurut bevir dalam Zaenuri (2016, p. 20) menjelaskan bahwa governance adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa spek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ada beberapa dimensi penting dari governance.

Dwiyanto (Nurhaeni, 2010:25-26) menjelaskan bahwa dimensi pertama dari governance adalah dimensi kelembagaan, yang menjelaskan bahwa governance merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua dari governance adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Governance adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

2. Collaborative Governance

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilainilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. CIFOR/PILI, dalam Haryono (2012: 7).

Gray dalam Haryono (2012: 48). menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Pada artikel ini kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Sedangkan menurut Sudarmo (2011:102-104) pada umumnya, collaboration dipandang sebagai perselisihan yang bisa disebabkan karena banyaknya kebijakan, dan respon dari organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan yang menjadi isu-isu semakin meluas keranah publik dari batasan norma-norma, kapasitas pemerintah pusat umumnya semakin meningkat serata pada diluar pemerintah daerah atau kota serta inisiatif spontan ditujukan untuk masyarakat luas. Menurut Agustina (2017: 60-80) collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Ansell dan Gash mendefinisikan Collaborative Governance sebagai Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik.

Definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.

- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Menurut Ansell and Gash dalam Putro (2014: 25-30) Collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
- b. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
- c. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik
- d. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
- e. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan regim-regim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
- f. Mobilisasi kelompok kepentingan
- g. Tingginya biaya dan politisasi regulasi
- h. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan
- i. Adanya kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya.

Peran pemerintah dalam pengelolaan Jeep Lava Tour Merapi sangat penting dalam hal kerja sama pemerintah dan pihak pelaksana Lava Tour Merapi, dalam hal ini pemerintah mengatur regulasi pengelolaan serta standarisasi pelaksanaan Jeep Lava Tour Merapi guna meminimalisir konflik serta permasalahan yang ada antar Basecamp penyedia Lava Tour maupun dengan pengguna jasa Lava Tour Merapi. Hal lainnya pemerintah dan pihak penyelenggara saling berkaitan dalam hal promosi wisata dan pengembangan objek wisata di mana hal tersebut dapat meningkatkan okupansi wisatawan Jeep Lava Tour Merapi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber pada retribusi objek wisata dan juga meningkatkan dalam segi pendapatan masyarakat sekitar merapi dan penyelenggara Jeep Lava Tour Merapi. Pemerintah dan pihak penyelenggara juga berkerja sama dalam hal pengembangan fasilitas pendukung wisatawan dalam hal ini fasilitas yang terdapat di objek wisata dan juga fasilitas pendukung lainnya

3. Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata

a. Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah.

Gunn dalam Taryana (2013) mendefinisikan wisata sebagai suatu pergerakan sementara manusia menuju tempat lain dari tempat tinggal dan bekerja asalnya, selama tinggal ditempat tujuan tersebut melakukan kegiatan dan diciptakan fasilitas untuk mengakomodasikan kebutuhan. Gunn dalam Taryana (2013) juga menyatakan bahwa suatu kawasan dikembangkan untuk tujuan wisata karena terdapat atraksi yang merupakan komponen dari suplai. Atraksi tersebut merupakan alasan terkuat untuk suatu perjalanan wisata, (dapat berupa ekosistem, tanaman langka, landmark, atau satwa) yang dapat ditemukan di perkotaan dan perdesaan.

Pariwisata perdesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan baik dalam hal obyek, lokasi, fungsi, skala maupun karakternya yang tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya (Widiyanto et al. dalam Taryana 2013). 20 Sukmana dalam Taryana (2013) menyebutkan bahwa Desa Wisata merupakan model konsep yang baik dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan nilai lokal. Desa Wisata adalah salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang muncul pada pertengahan tahun 1990.

Menurut Spinllane (dalam Fitriana, 2013: 8) pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Definisi atau pengertian pariwisata menurut Mc. Intosh dan Goelder (dalam Fitriana, 2013: 9) mengungkapkan bahwa Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung. Sedangkan menurut Spillane (dalam Fitriana 2013: 9) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensis sosial budaya dan ilmu.

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata

Pariwisata memiliki jenis dan bentuk yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada, berikut Jenis dan Bentuk Pariwisata :

1) Jenis Jenis Pariwisata

Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (dalam Alfira, 2014: 20-21):

a) Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

b) Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c) Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism).

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain.

2) Bentuk Pariwisata

Secara umum bentuk pariwisata adalah semua yang berhubungan dengan objek yang dapat disaksikan pengunjung pada situasi tertentu dan waktu yang tepat, serta kemauan untuk mengunjungi objek tersebut. Adapun bentuk dan jenis pariwisata menurut Yoeti (dalam Fitriana, 2013: 13) di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

a) Berdasarkan Letak Geografi

Yaitu pariwisata lokal, pariwisata regional, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.

b) Berdasarkan Tujuan

Yaitu pariwisata rekreasi, pariwisata budaya, pariwisata olahraga, pariwisata sosial, pariwisata kesehatan, pariwisata politik, pariwisata keagamaan.

c) Berdasarkan Pengaruh terhadap neraca pembayaran

Yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan devisa dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu negara tertentu, pariwisata pasif adalah kegiatan pariwisata yang mengurangi cadangan devisa negara ditandai dengan keluarnya penduduk ke suatu negara lain ke negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan.

d) Menurut alasannya

Yaitu seasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan padawaktu-waktu tertentu, occasional tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu).

c. Pengembangan Pariwisata

Pengertian dasar yang harus diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah mengetahui komponen-komponen pengembangan pariwisata dan hubungan internal di antara komponen-komponen tersebut. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang di anggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Menurut Hadinoto (Hadinoto, 1996) ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, yaitu:

1) Atraksi Wisata.

Atraksi merupakan suatu daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan. Atraksi wisata biasanya terdiri dari fasilitas-fasilitas yang bersifat pokok dalam suatu objek wisata seperti daya tarik utama seperti wahana permainan, wahana fotografi dan wahana petualangan. Atraksi wisata merupakan suatu hal yang bisa menjadi sesuatu yang di nikmati oleh wisatawan atau yang menjadikan suatu alasan oleh wisatawan untuk datang ke suatu objek wisata.

2) Promosi dan Pemasaran.

Promosi dan pemasaran merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

3) Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata).

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum atau tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

4) Transportasi.

Transportasi mempunyai dampak yang besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

5) Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto (dalam Fitriana, 2013: 19) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, antara lain :

a) Obyek dan Daya Tarik Wisata Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu

daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

1. Lfm sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
5. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
6. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b) Prasarana Wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c) Sarana Wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

d. Keselamatan Wisatawan

Keselamatan Wisatawan adalah jaminan objek pendukung dalam hal meminimalisir resiko dari suatu objek dalam destinasi wisata yang mencakup peralatan keselamatan, Standart Operasional Prosedur dan Asuransi sehingga menciptakan rasa aman dari segala resiko yang di sebabkan oleh atraksi wisata maupun kecelakaan wisata bagi para wisatawan

G. Kerangka Pikir

Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan dan wilayah laut yang luas. Dengan keadaan tersebut, banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas serta daya tarik tersendiri, sehingga dapat memunculkan perhatian dari orang-orang dan menarik minat untuk mendatangi daerah tersebut untuk berwisata. Tidak dapat dipungkiri jumlah tempat atau destinasi wisata di Indonesia sangat banyak dan beragam. Daya tarik atau *main attraction* tersebut mulai dari yang bersifat alami seperti pemandangan alam, pemandian air panas, danau, gunung dll. Lalu untuk *main attraction* yang bersifat buatan seperti spot foto tambahan, wahana permainan, taman, dan tempat edukasi seperti museum ataupun laboratorium. Saat ini, semakin banyak ditemui berbagai pengembangan obyek wisata di berbagai daerah salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan daya tarik bersifat alami hingga buatan pun semakin gencar dikembangkan salah satunya wisata Lava Tour Merapi. Wisata tersebut merupakan wisata dengan mengendarai Jeep untuk mengelilingi merapi untuk melihat cerita historis pasca letusan gunung merapi tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan unsur keamanan dalam wisata tersebut baik keamanan untuk wisatawan, keamanan dari segi kendaraan dan keahlian supir dalam mengendarai jeep sangatlah penting. Sehingga sangat diperlukan tata kelola keselamatan atraksi Wisata Volcano Tour Merapi untuk wisatawan.

Bagan 1. Kerangka Pikir



H. Definisi Konseptual

1. Kolaborasi Governance

Kolaborasi merupakan suatu upaya untuk melakukan kerjasama yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama

2. Governance

Governance adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata merupakan upaya untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang di anggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

I. Definisi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Struktur Jaringan Pengelolaan Volcano Tour Merapi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan antar stakeholder satu dengan lainnya • Menjelaskan unsur jaringan stakeholder • Kaitannya dengan bentuk <i>networked structure</i>
2	Komitmen terhadap Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa sebuah <i>network</i> dalam collaborative governance harus ada • Terdapat perhatian dan komitmen dari masing-masing stakeholder untuk mencapai tujuan-tujuan positif • Teraktualisasikan ke dalam misi umum
3	Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan collaborative governance	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan antar elemen stakeholder didasarkan pada hubungan professional atau sosial • Mempercayakan pada informasi atau usaha dari stakeholder
4	Akses terhadap kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan yang jelas • Memberikan otoritas masing-masing

		stakeholder <ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasi keputusan dengan yang ada di lapangan
5	Pembagian akuntabilitas responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) • Berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota paguyuban
6	Berbagi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses bagi para anggota paguyuban • Perlindungan privacy masing-masing anggota
7	Akses terhadap sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sumber keuangan • Teknis • Manusia • Sumber daya lainnya yang diperlukan

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa di lapangan, serta kegiatan atau keadaan tertentu secara mendalam. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah yang ada, sehingga peneliti tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klarifikasi data saja, tetapi juga pada analisis dan interpretasi dari data tersebut (Putra, 2018). Alasan mengapa peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Turi Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang akan di lakukan pada tingkat kantor desa dan basecamp penyelenggara kegiatan Lava Tour Merapi dengan langsung menemui kepala desa beserta staf-staf yang berhubungan langsung pada proses *Collaboratif Government* dalam Penyelenggaraan wisata lava Tour merapi dalam segi keselamatan parawisatawan lava tour merapi. Lokasi ini di pilih di karenakan mayoritas track Merapi Lava Tour Melewati Daerah Cangkringan dan di lokasi ini banyak warga yang mengelola Jeep Lava Tour Merapi

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang di gunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan secara rinci dan jelas agar memperoleh kesimpulan yang telah diamati oleh peneliti terhadap objek yang diteliti, yaitu Pemerintah Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Sedangkan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer Pada Penelitian ini adalah Semua Informasi Mengenai Collaborative Governance dalam Mewujudkan Keselamatan Wisatawan Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pariwisata di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Yang Secara Langsung Dari Unit Analisa Di Jadikan Objek Penelitian, Baik Itu Pemerintahan Desa Cangkringan, Maupun Paguyuban Penyedia Jeep Lava Tour Merapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber langsung dari sumbernya mengenai informasi tentang Collaborative Government dalam Mewujudkan Keselamatan Wisatawan Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pariwisata di Desa Umbulharjo kecamatan Cangkringan yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan berita-berita yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Hak-Hak Wisatawan dalam Pelayanan Pariwisata	Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Program Pengembangan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 tahun 2016 Tentang RPJMD tahun 2016-2021
Data Kecelakaan Pengguna Jeep Lava Tour Merapi	BNPB
Kecelakaan Jeep Lava Tour Merapi	https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/02/20/512/1032338/jip-merapi-celaka-di-jalan-bebeng-kaliadem-ini-yang-bakal-dilakukan-pemkab-sleman

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerangkan yakni berbagai cara yang dilakukan atau digunakan peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data yang mendukung dalam penelitiannya. Cara-cara dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (interview), melakukan pengamatan (observasi), angket (kuesioner), dokumentasi dan gabungan dari keempat teknik tersebut (Sugiyono, 2013).

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua orang yang memiliki maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban dari narasumber (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini melakukan wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan mendengarkan keterangan lisan dari pemerintah desa, dan masyarakat Desa terkait Peran Pemerintah Desa dengan Para Stackholder dalam Pengelolaan Jeep Lava Tour Merapi dengan sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan mewawancarai Kepala desa, perangkat dan staf desa, masyarakat desa serta Para penyedia Jasa Jeep Lava Tour Merapi.

Tabel 1.5 Wawancara

No.	Instansi	Narasumber	Jumlah
-----	----------	------------	--------

1.	Pemerintah Desa Umbulharjo		1
2.	Operator Jeep Lava Tour Merapi	3	3
Jumlah			4

Pemerintah Desa Umbulharjo sebagai pengawas dalam pengelolaan jeep merapi lava tour menjadi peran penting sehingga perlu mengetahui informasi dari pihak desa mengenai pengelolaan yang di lakukan dari segi pemerintahan. Operator Jeep Merapi lava tour yang di ambil merupakan 3 basecamp dengan total armada terbanyak yaitu dari :

1. Basecamp Merapi Lava Tour “ Bundo Merapi ”
2. Basecamp Merapi Lava Tour “ Jeep Merapi Adventure”
3. Basecamp Merapi Lava Tour “ Lost World Castle”

Para pengelola basecamp yang berperan langsung di lapangan tentunya menjadi narasumber penting di karenakan sebagai penggerak dari penyedia jasa Lava Tour Merapi.

b. Observasi

Dalam penelitian ini kegiatan observasi mencakup pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian serta dilakukan pencatatan secara sistematis, objektif, logis, dan tentunya rasioanal terhadap suatu kejadian terhadap topik penelitian. Dengan memperhatikan kegiatan Lava Tour dan juga penerapan standar keselamatan yang di terapkan di lapangan

5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif pada bagian analisis data menurut Sugiyono (2014:244) merupakan tahapan yang masuk dalam proses mencari secara sistematis mengenai data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, catatan saat berada di lapangan yang selanjutnya mengkategorikan data ke dalam kategori kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih bagian yang dianggap penting dan selanjutnya akan dipelajari, lalu dibuatlah kesimpulan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dijelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum atau memilih hal-hal yang dianggap menjadi inti atau pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting, atau bisa juga proses yang dilakukan guna menyederhanakan data-data yang mentah atau temuan yang didapat saat berada di lapangan. Temuan-Temuan yang di temukan di lokasi penelitian yaitu Penyedia Jasa Jeep Merapi Lava Tour di olah dengan memperhatikan hasil wawancara yang di dapat dari pemerintah desa dan stakeholder penyedia jasa jeep lava tour yang kemudian di rangkum dan di olah data yang di perlukan maupun tidak menjadi suatu kesimpulan dari data yang di dapat di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan berbentuk penguraian secara singkat berupa bagan, matrik, network, chart, atau grafis yang disajikan oleh peneliti. Dalam peneliti kualitatif, penyajian data yang lazim dijabarkan berbentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian penarikan kesimpulan di simpulkan dari temuan data wawancara Penyedia Jasa Lava Tour Merapi. Dan para pemerintah daerah yang kemudian di tarik benang merah kesimpulan dari temuan yang di dapatkan yang kemudian di jelaskan bagaimana peran pemerintah desa dan penyedia Jeep Lava Tour Merapi terhadap keselamatan wisatawan di tahun 2019.